



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BNN KOTA SURAKARTA**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanan-Nya lah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNN Kota Surakarta Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini.

Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNN Kota Surakarta tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 31 Desember 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Surakarta**



Gede Nakti Widhiarta, S.I.K.

DAFTAR ISI

KA KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERJANJIAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam agenda pembangunan nasional Asta Cita Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, permasalahan narkoba menjadi salah satu isu strategis yang diangkat dalam misi asta cita ke-7 yakni “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Presiden juga menguatkan “pencegahan dan pemberantasan narkoba” menjadi program prioritas ke-6. Hal ini semakin menegaskan bahwa permasalahan narkoba merupakan salah satu ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045.

BNN Kota Surakarta selaku instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan narkotika di Kota Surakarta, pada tahun 2024 ini telah melakukan berbagai upaya di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai upaya mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Strategi yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkoba melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi.

Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, BNN Kota Surakarta sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban

melaporkan kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

c. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan

tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kota Surakarta.

2. Tugas

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Swasta dan Masyarakat;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK;
- f. Pelayanan administrasi BNNK.

4. Kewenangan

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN Kota Surakarta berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. Adapun struktur organisasi BNN Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNN Kota Surakarta : I Gede Nakti Widhiarta, S.I.K.
2. Kepala Subbag Umum : Masriya Kumala
3. Ketua Tim Kerja P2M : Sri Nurlyani
4. Ketua Tim Kerja Rehabilitasi : Indri Setyorini
5. Ketua Tim Kerja Pemberantasan : Arga Adhitya Wardhana

STRUKTUR ORGANISASI BNN Kota Surakarta



e. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

Guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasara strategis peningkatan penanganan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNN maka ditetapkan Perjanjian Kinerja BNN di masing-masing BNN Kabupaten/Kota Tahun 2024 adapun untuk Perjanjian Kinerja BNN Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Kementerian/Lembaga : BNN Kota Surakarta

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	52,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	91,69
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,42

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggaraan layanan IBM yang operasional	2 unit
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,42 Indeks
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surakarta	87
10.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surakarta	96,21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BNN Kota Surakarta merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara *cascading* turun hingga ke level bawah di BNN Kabupaten/Kota di jajarannya.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surakarta Tahun 2024 ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan **6 (enam) indikator kinerja kegiatan melebihi target dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sesuai target, dan 2 (dua) indikator kurang dari target**. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis tahun 2024 dan penjelasan hasil capaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA BNN KOTA SURAKARTA 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4		
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	52,00	45,36	87,23%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4		
	dan peredaran gelap narkotika				
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	91,69	86,51	94,35%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,42	3,47	101,46%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	84,85	124,77%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10	100%
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	6 Lembaga	600%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4		
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggaraan layanan IBM yang operasional	2 unit	2 Unit	100%
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,42 Indeks	3,53	103,21%
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surakarta	87	99,09	113,89%
10.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surakarta	96,21	98,18	102%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Surakarta selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1	Sasaran Strategis	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
---	--------------------------	--

Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)	52	45.36 (Sangat Rendah)	87,23%

Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)	53	50.13 (Tinggi)	94.58%

Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)	52	52,35 (Tinggi)	100.67%

Definisi Operasional

Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja merupakan kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode Pengukuran

Metode pengukuran menggunakan kuesioner Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba (*Anti Drug Scale/ADS*) sebanyak 47 pertanyaan dan 28 pertanyaan prediktor serta evaluasi kegiatan informasi dan edukasi yang telah dilaksanakan dengan kriteria yaitu:

- a. Sangat Tinggi

- b. Tinggi
- c. Rendah
- d. Sangat Rendah

Keberhasilan/Kegagalan

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 52 dapat terealisasi dengan skor sebesar 45.36 dengan persentase sebesar 87.23%, termasuk dalam kategori sangat rendah. Hasil yang diperoleh dalam perhitungan lebih rendah dari target.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Nilai yang rendah pada perhitungan indeks ketahanan diri remaja anti narkoba, disebabkan karena ada kesalahan dalam penentuan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan edukasi yang bersumber pada anggaran DIPA tahun 2024, dimana seharusnya melaksanakan kegiatan informasi dan edukasi namun hanya melaksanakan kegiatan edukasi. Variabel dependen dalam penentuan dektari komponen yang diperhitungkan adalah jumlah evaluasi kegiatan informasi dan jumlah evaluasi kegiatan edukasi dibagi 2, karena jumlah evaluasi kegiatan informasi tidak ada (0) sehingga hasilnya menjadi sangat kecil. Kegiatan informasi banyak dilaksanakan tanpa dukungan anggaran (Non DIPA) sehingga tidak menambah nilai dalam perhitungan dektari.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran Indeks Ketahanan Remaja Anti Narkoba dilakukan melalui penyebaran informasi dan edukasi melalui berbagai media (talkshow, penyiaran, insert konten, luar ruang dll) dan pembentukan remaja teman sebaya dengan anggaran sebesar Rp. 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.650.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Anggaran tidak terserap seluruhnya dikarenakan adanya kebijakan blokir anggaran perjalanan dinas.

Formula yang digunakan untuk mengukur pada indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya 1x Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pelaksanaan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika
- b. Terlaksananya 3x Dialog Interaktif Remaja
- c. Terlaksananya 1x Pembekalan Bagi Pendamping RTS
- d. Terlaksananya 1x Pemantauan Dan Pendampingan Implementasi Remaja Teman Sebaya
- e. Terlaksananya 1x Informasi dan Edukasi Melalui Talkshow/Tatap Muka
- f. Terlaksananya 1x Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye/Pagelaran Seni
- g. Terlaksananya 2x Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten

NO	KEGIATAN	OUTPUT	JUMLAH SEBARAN	KET
1.	Dialog Interaktif Remaja	Remaja Teman Sebaya (Pelajar SMP)	10 Orang	DIPA
2.	Informasi dan Edukasi Melalui Talkshow/Tatap Muka (1 Output)	Pelajar	30 orang	DIPA
3.	Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye/Pagelaran Seni (1 Output)	Pelajar	100 orang	DIPA
4.	Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten (2 Output)	Masyarakat	1.500 orang	DIPA
5.	Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten (24 Output)	Masyarakat	13.720 orang	NON DIPA
6.	Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang (Pemasangan Spanduk di 15 kelurahan bersinar)	Masyarakat yang terpapar informasi	15.300 orang	NON DIPA
7.	Sosialisasi tatap muka (konvensional)	Jumlah masyarakat yang terpapar informasi	31.392 orang	NON DIPA
8.	Penayangan konten media sosial IG, youtube, Fb, twitter	Pengguna internet yang terpapar informasi	Jumlah Konten 1.328, Jumlah Followers/Subcriber/viewer sebanyak 9.797	NON DIPA
9.	Sosialisasi melalui media elektronik (talkshow radio) (5 kali)	Pendengar radio dari masyarakat yang terpapar informasi	1.700 pendengar	NON DIPA
10	Pembina Upacara (57 kali)	Siswa yang terpapar informasi	17.774 orang	NON DIPA

11	KIE Keliling (55 kali)	Masyarakat yang terpapar	1.000 orang	NON DIPA
12	Car Free Day (57 kali)	Masyarakat yang terpapar	16.250 orang	NON DIPA
13	Informasi dan Edukasi Melalui Media Elektronik (Videotron) (98 kali)	Masyarakat yang terpapar	35.000 orang	NON DIPA

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Tim P2M akan berkoordinasi dengan pembina fungsi di kedeputan pencegahan terkait skema penilaian serta akan mengajukan revisi anggaran di tahun 2025 agar semua program kegiatan informasi dan edukasi dapat dilaksanakan.

2	Sasaran Strategis	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
----------	--------------------------	---

Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)	91.69	86.51 (Tinggi)	94.35%

Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)	78.69	91.69 (Sangat Tinggi)	116.53%

Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)	78.68	85.98 (Tinggi)	109.27%

Definisi operasional

Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika sebagai “kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba”.

Metode Pengukuran

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba menggunakan kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang ditujukan bagi 5 (lima) keluarga terpilih dari 10 (sepuluh) keluarga yang di intervensi dengan kriteria yaitu:

- a. Sangat Tinggi
- b. Tinggi
- c. Rendah
- d. Sangat Rendah

Keberhasilan/Kegagalan

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 91,69 (sangat tinggi) dapat terealisasi dengan skor sebesar 86,51 (kategori tinggi) dengan persentase capaian 94.35 % termasuk dalam kategori tinggi. Hasil perhitungan yang diperoleh lebih rendah dari target.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Latar belakang pendidikan peserta berbeda sehingga berpengaruh dalam kemampuan memahami materi dan hasil pelatihan tidak maksimal.
- b. Peserta kegiatan berasal dari lokus yang berbeda dengan tahun sebelumnya namun penetapan target kinerja berdasarkan capaian target tahun sebelumnya.

- c. Kegiatan dilaksanakan pada hari kerja sehingga peserta yang sesuai kriteria dan bersedia atau berkomitmen untuk hadir jumlahnya terbatas.
- d. Belum adanya penganggaran khusus P4GN dari Kelurahan untuk program Kelurahan Bersinar di tahun ini;
- e. Belum adanya sinergitas dengan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan bersinar

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 103.600.000,- (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan anggaran tersebut terealisasi seluruhnya.

Formula yang digunakan untuk mengukur pada indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Advokasi adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dengan sasaran 10 keluarga, terdiri dari 5 keluarga dari kelurahan Pajang dan 5 keluarga di Kelurahan Mojosongo dan terbentuk 2 (dua) Kelurahan Bersinar di Tahun 2024.
- b. Kegiatan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dilaksanakan sebanyak 4 kali.
- c. Kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa/Kelurahan dilaksanakan di 2 kelurahan bersinar yaitu Kelurahan Pajang dan Kelurahan Mojosongo.
- d. Telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
- e. Telah melaksanakan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
- f. Telah melaksanakan Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

- g. Telah melaksanakan Rapat Persiapan Dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Keluarga Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa.
- h. Telah melaksanakan Koordinasi Dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.
- i. Telah melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa.
- j. Telah melaksanakan Fasilitasi dan Asistensi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.
- k. Telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Tim P2M selaku pelaksana kegiatan akan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi ke sekolah dan kelurahan dalam mencari peserta sehingga banyak pilihan peserta dan bisa discreening terlebih dahulu.
- b. Merekomendasikan untuk memaksimalkan kegiatan P4GN dengan menyisipkan kegiatan P4GN pada kegiatan yang sudah ada (*insert konten*).
- c. Koordinasi intensif dengan stakeholder terkait untuk menjalin sinergitas dalam menyukseskan program Kelurahan Bersinar.

3	Sasaran Strategis	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.
----------	--------------------------	--

Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP)	3.42	3.48 (Sangat Mandiri)	101,75%

Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP)	3,25	3,42 (Sangat Mandiri)	105.23%

Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP)	3,25	3,42 (Sangat Mandiri)	105.23%

Definisi Operasional

Indeks Kemandirian Partisipatif dilakukan untuk mengukur partisipasi dari suatu lembaga dalam penanganan P4GN. Pengukuran berdasarkan aspek Sumber Daya Manusia, Metode, Anggaran, Sistem, Sarana Prasarana, dan Kegiatan P4GN.

Metode Pengukuran

Metode pengukuran menggunakan kuesioner Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) untuk mengukur output (jumlah program pemberdayaan), dengan kriteria:

- a. Sangat mandiri
- b. Mandiri
- c. Kurang Mandiri
- d. Tidak Mandiri

Keberhasilan/Kegagalan

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3,42 persentase 105,23% dapat terealisasi dengan skor sebesar 3,48 dengan persentase sebesar 101,75% termasuk dalam kategori sangat mandiri. Hasil yang diperoleh dalam perhitungan lebih tinggi dari target.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penggiat P4GN di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan menyatakan bahwa peningkatan kapasitas dalam bentuk Bimbingan Teknis dirasakan kurang sehingga membutuhkan program pendampingan penggiat. Penggiat juga membutuhkan dukungan media P4GN yang dapat digunakan dalam kegiatan-kegiatan dilingkungannya;
- b. Penggiat yang sudah dibentuk ditahun-tahun sebelumnya perlu pembinaan berkelanjutan sehingga dapat terus berkegiatan.
- c. Aspek dalam kuesioner IKP kurang sesuai dengan sasaran responden (Masyarakat, Swasta dan Pendidikan), sebagai contoh responden instansi pemerintah tetapi item pertanyaan di aspek kegiatan mengukur aktivitas sehari-hari individu/keluarga;
- d. Dalam kuesioner KOTAN, pertanyaan di instansi pemerintah kurang sesuai (variable ketahanan keluarga), sebaiknya pertanyaan mengenai peran masing-masing instansi dalam P4GN. Dikarenakan juga responden di instansi pemerintah tidak semua bertempat tinggal di wilayah kota Surakarta. Agar variabel disesuaikan dengan sasaran dan pertanyaan harus berbeda antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain;
- e. Jadwal pengambilan data KOTAN bersamaan dengan pengambilan data/survei IKRN kesulitan dalam pembagian tugas;
- f. Bahasa yang digunakan dalam kuesioner KOTAN tidak mudah dipahami oleh responden, mengingat responden berasal dari berbagai latar belakang pendidikan;

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipatif dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 182.390.000,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan anggaran tersebut terealisasi seluruhnya.

Capaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dihitung dari jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba. Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu Rapat Kerja, Workshop/Bimbingan Teknis, Tes Urine, Monitoring, dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat. Dengan target di 2 (dua) instansi yaitu Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan.

a. Instansi Pemerintah

NO	KEGIATAN	OUTPUT	JUMLAH PESERTA	KET
1	Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Tesinkronnya program kerja Pemberdayaan Masyarakat di wilayah BNNP Jawa Tengah	9 BNNK di Wilayah BNNP Jawa Tengah	BNNK Surakarta, BNNK Magelang, BNNK Purbalingga, BNNK Temanggung, BNNK Cilacap, BNNK Batang, BNNK Tegal, BNNK Banyumas, BNNK Kendal
2	Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	Terpaparnya 8 instansi tentang program P4GN dan terpetakannya calon penggiat P4GN	20 Instansi	Kantor Kemenag Surakarta, Bakesbangpol Surakarta, BPBD Surakarta, BPOM Surakarta, Damkar Surakarta, Denpom IV/4 Surakarta, Disdukcapil Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta,

				Kemensos RI Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, PT. Jasa Marga Toll Road Solo – Ngawi, Diskominfo Surakarta, Solo Safari, DP3AP2K B Surakarta, Kecamatan Serengan, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Pasarkliwon, Kelurahan Pajang, Kelurahan Mojosongo
3	Audiensi dengan Stakeholder Dalam Rangka Pemetaan Pemberdayaan Masyarakat	Terkoordinasikan Program Pemberdayaan Masyarakat ke Instansi Pemerintah dan rekomendasi calon penggiat P4GN	9 Instansi	PT. Jasa Marga Ruas Solo – Ngawi, Pengadilan Negeri Surakarta, BPDB Surakarta, Kemensos RI Sentra Terpadu Prof. DR. Soeharso Surakarta, Solo Safari, Denpom IV/4 Surakarta, PDAM Surakarta, RRI Surakarta, BPOM Surakarta
4	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Terjalin sinergi dengan stakeholder dalam pemetaan calon penggiat dan rencana aksi P4GN	25 Instansi	Baappeda, Kesbangpol, Satpol PP, Bagian Hukum Pemkot Surakarta, BKPSDM Kota Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Satresnarkoba Polresta Surakarta, Kodim 0735 Surakarta,

				Kejaksaan Negeri Surakarta, Camat Surakarta, Dinas Sosial, Diskominfo SP Surakarta, Dinas Koperasi UKM, dan Perindustrian, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Kantor Kemenag Kota Surakarta, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, PKK Surakarta, Polsek Laweyan, Polsek Jebres, Koramil Laweyan, Koramil Jebres, Lurah Mojosongo, Lurah Pajang
5	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN	Terbentuknya penggiat di instansi pemerintah	10 instansi	BPBD Surakarta, Denpom IV/4 Surakarta, BPOM Surakarta, Dispendukcapil Kota Surakarta, Pengadilan Kota Surakarta, Kemensos RI Surakarta Sentra Terpasu Prof. Dr. Soeharso Surakarta, PT. Jasa Marga Solo Ngawi, Damkar Surakarta, Kelurahan Pajang, Kelurahan Mojosongo
6	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tes Urine	Terwujudnya lingkungan kerja bersih narkoba	808 orang	Dipa = 265 Non Dipa = 543
7	Workshop Penggiat P4GN	Penggiat P4GN Tahun 2022 yang mendapat pembinaan lanjutan	15 instansi	Kemenag Surakarta, Bakesbangpol Surakarta, Bapenda Surakarta, DP3AP2KB

				Surakarta, Diskominfo SP Surakarta, Kecamatan Paswarkliwon, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Jebres, Kecamatan Serengan, Badan Antar Gereja Kristen Surakarta, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Ngemingan, Kevikepan Surakarta, Parisada Hindu Dharma Indonesia Surakarta, Majelis Agama Konghucu Surakarta
8	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hambatan dalam implementasi rencana aksi penggiat P4GN dan terkumpulnya IKP tahun 2023	10 Instansi	BPBD Surakarta, Denpom IV/4 Surakarta, BPOM Surakarta, Dispendukcapil Kota Surakarta, Pengadilan Kota Surakarta, Kemensos RI Surakarta Sentra Terpasu Prof. Dr. Soeharso Surakarta, PT. Jasa Marga Solo Ngawi, Damkar Surakarta, Kelurahan Pajang, Kelurahan Mojosongo
9	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hasil evaluasi pelaksanaan aksi penggiat P4GN dan evaluasi hasil perhitungan IKP	10 Instansi	BPBD Surakarta, Denpom IV/4 Surakarta, BPOM Surakarta, Dispendukcapil Kota Surakarta, Pengadilan Kota

				Surakarta, Kemensos RI Surakarta Sentra Terpasu Prof. Dr. Soeharso Surakarta, PT. Jasa Marga Solo Ngawi, Damkar Surakarta, Kelurahan Pajang, Kelurahan Mojosongo
10	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersampainya program KOTAN kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait	24 Instansi	Bappeda, Bakesbangpol, Satpol PP, Bagian Hukum Pemkot Surakarta, BKPSDM, Pengadilan Negeri, Satres Narkoba, Kejaksaan Negeri, Camat Jebres, Camat Laweyan, Camat Banjarsari, Camat Pasar Kliwon, Kec. Serengan, Lurah Sudiroprajan dan Lurah Setabelan, Dinsos, Diskominfo SP, Dinsnaker, Dinkop UKM Perin, Cabdin Pendidikan Wilayah VII, Kantor Kemenag SKA, Dinkes, DP3AP2KB, PKK Surakarta, Polsek Banjarsari, Polsek Jebres, Koramil Banjarsari, Koramil Jebres
11	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersinerginya program P4GN dengan kegiatan di stakeholder dalam mewujudkan KOTAN	6 instansi	Kodim 0735/Surakarta, Satres Narkoba Polresta Surakarta, Kelurahan

				Mojosongo, Kelurahan Pajang, Bakesbangpol Kota Surakarta, BKPSDM Surakarta
12	Workshop Tematik P4GN	Terbentuk agen of change dalam upaya P4GN untuk meningkatkan indeks KOTAN	20 orang	Pemerintah dan Masyarakat di Kelurahan Bersinar (Pajang dan Mojosongo)
13	Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba Pada Sektor Kelembagaan	Terwujudnya komitmen dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan KOTAN berupa upaya pembentukan regulasi dan kolaborasi program kegiatan	20 instansi	Forkopimda Kota Surakarta, Pimpinan Daerah di Wilayah Solo Raya dan OPD
14	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba	7 instansi	Kodim 0735/Surakarta, Satres Narkoba Polesta Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pajang, PT. Jasa Marga Solo - Ngawi

b. Lingkungan Pendidikan

NO	KEGIATAN	OUTPUT	JUMLAH PESERTA	KET
1	Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Tesinkronnya program kerja Pemberdayaan Masyarakat di wilayah BNNP Jawa Tengah	9 BNNK di Wilayah BNNP Jawa Tengah	BNNK Surakarta, BNNK Magelang, BNNK Purbalingga, BNNK Temanggung, BNNK Cilacap, BNNK Batang, BNNK Tegal, BNNK Banyumas, BNNK Kendal

2	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	Terpaparnya Instansi pendidikan tentang Program P4GN dan terpetakannya calon penggiat P4GN	14 Instansi	SMKN 7 Surakarta, SMKN 8 Surakarta, SMKN 9 Surakarta, SMAN 8 Surakarta, SMA Pradita Dirgantara, SMPN 12 Surakarta, SMPN 13 Surakarta, SMPN 14 Surakarta, SMPN 15 Surakarta, SMPN 20 Surakarta, SMPN 24 Surakarta, SMPN 25 Surakarta, SMPN 26 Surakarta
3	Audiensi dengan Stakeholder Dalam Rangka Pemetaan Pemberdayaan Masyarakat	Terkoordinasikan Program Pemberdayaan Masyarakat ke Lingkungan Pendidikan	3 Instansi	SMPN 20 Surakarta, SMKN 9 Surakarta dan SMP Olahraga Surakarta
4	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN	Terbentuknya penggiat di Lingkungan Pendidikan	14 Instansi	SMKN 7 Surakarta, SMKN 8 Surakarta, SMKN 9 Surakarta, SMAN 8 Surakarta, MAN 2 Surakarta, SMA Pradita Dirgantara, SMPN 12 Surakarta, SMPN 13 Surakarta, SMPN 14 Surakarta, SMPN 15 Surakarta, SMPN 20 Surakarta, SMPN 24 Surakarta, SMPN 25 Surakarta, SMPN 26 Surakarta
5	Workshop Penggiat P4GN	penggiat P4GN Tahun 2022 yang telah mendapatkan pembinaan lanjutan	5 Instansi	SMAN 1 Surakarta, SMAN 3 Surakarta, SMPN 1 Surakarta, SMPN 4 Surakarta, SMPN 5 Surakarta
6	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hambatan dalam implementasi rencana aksi penggiat P4GN dan terkumpulnya IKP tahun 2024	14 Instansi	SMKN 7 Surakarta, SMKN 8 Surakarta, SMKN 9 Surakarta, SMAN 8 Surakarta, MAN 2 Surakarta, SMA Pradita Dirgantara, SMPN 12 Surakarta, SMPN 13 Surakarta, SMPN 14 Surakarta, SMPN 15 Surakarta, SMPN 20 Surakarta, SMPN 24 Surakarta, SMPN 25 Surakarta, SMPN 26 Surakarta
7	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Hasil evaluasi pelaksanaan aksi penggiat P4GN dan	14 instansi	SMKN 7 Surakarta, SMKN 8 Surakarta, SMKN 9 Surakarta, SMAN 8 Surakarta, MAN

		evaluasi hasil perhitungan IKP		2 Surakarta, SMA Pradita Dirgantara, SMPN 12 Surakarta, SMPN 13 Surakarta, SMPN 14 Surakarta, SMPN 15 Surakarta, SMPN 20 Surakarta, SMPN 24 Surakarta, SMPN 25 Surakarta, SMPN 26 Surakarta
8	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersampainya program KOTAN di lingkungan pendidikan dan adanya dukungan program	3 Instansi	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kantor Kemenag Surakarta
9	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Tersinerginya program P4GN dengan kegiatan di stakeholder dalam mewujudkan KOTAN	2 instansi	SMPN 5 Surakarta, MAN 2 Surakarta
10	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	Terkumpulnya data untuk perhitungan IKOTAN 2024	5 instansi pendidikan	SDN Bratan 1 Surakarta, SMPN 5 Surakarta, MTsN 2 Surakarta, MAN 2 Surakarta dan Politeknik Indonusa Surakarta

Setelah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat P4GN dan Workshop Penggiat P4GN yang diselenggarakan oleh BNN Kota Surakarta, terdapat 10 Instansi Pemerintah dan 14 instansi di lingkungan pendidikan yang berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta nilai IKP (Indeks Kemandirian Partisipatif) masing-masing instansi/lembaga di instansi pemerintah dan lingkungan pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Instansi/Lembaga	Lingkungan	Kegiatan P4GN	IKP	Kategori	Keterangan
1	BPBD Surakarta	Lingkungan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi P4GN pada kegiatan BPBD di masyarakat - Sosialisasi pada kegiatan internal (Briefing, apel pagi dll) - Sosialisasi kepada tagana di kelurahan-kelurahan 	3,20	B	Mandiri
2	Dispendukcapil Kota Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan standing banner di area pelayanan kependudukan 	3,04	B	Mandiri

			- Penayangan konten P4GN di LED diruang pelayanan			
3	Kelurahan Mojosongo	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan AP dan IBM - Sosialisasi kepada masyarakat, remaja, pkk, posyandu, pelajar dll - Pembuatan regulasi sk Kelurahan Bersinar dari Lurah - Insert konten P4GN pada kegiatan Olah raga, seni, budaya - Pemasangan spanduk atau himbauan bahaya narkoba 	4,00	A	Sangat Mandiri
4	Kemensos RI Sentra Terpadu Prof. DR. Soeharso	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi P4GN pada internal - Sosialisasi P4GN pada peserta yang mengikuti pelatihan 	3,20	B	Mandiri
5	B POM Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pada masyarakat, pelajar - Razia ke apotek - Pembuatan konten edukasi di media sosial 	4.00	A	Sangat Mandiri
6	PT. Jasa Marga Ruas Tol Solo - Ngawi	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada pegawai/internal (apel/briefing) - Regulasi pada Tata Tertib Pegawai - Patroli keamanan dan keselamatan pengguna jalan tol termasuk razia kejadian mencurigakan 	3,20	B	Mandiri
7	Damkar Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pada kegiatan Damkar di masyarakat, sekolah - Pemasangan himbauan bahaya rokok di tempat kerja - Sosialisasi kepada internal (apel/briefing dll) 	3,20	B	Mandiri
8	Denpom Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pada anggota - Tes urine pada anggota 	3,20	B	Mandiri
9	Pengadilan Negeri Surakarta	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada internal 	4.00	A	Sangat Mandiri

			<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi melalui media sosial - Mengkoordinasikan kepada OPD terkait untuk bersama menangani permasalahan narkoba 			
10	Kelurahan Pajang	Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan AP dan IBM - Sosialisasi kepada masyarakat, remaja, pkk, posyandu, pelajar dll - Pembuatan regulasi sk Kelurahan Bersinar dari Lurah - Insert konten P4GN pada kegiatan Olah raga, seni, budaya - Pemasangan spanduk atau himbauan bahaya narkoba 	4.00	A	Sangat Mandiri
11	SMPN 12 Surakarta	Instansi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan poster P4GN dilingkungan sekolah - Pembentukan regulasi tata tertib siswa dengan sistem poin - Sosialisasi pada kegiatan MPLS - Integrasi materi P4GN pada pelajaran yang relevan - Pemutaran mars BNN dilingkungan sekolah - Pembuatan konten medsos tentang bahaya narkoba dan menyanyikan mars BNN - Pembentukan duta anti narkoba 	3,88	A	Sangat Mandiri
12	SMPN 13 Surakarta	Instansi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan poster P4GN dilingkungan sekolah - Pembentukan regulasi tata tertib siswa dengan sistem poin - Sosialisasi pada kegiatan MPLS - Integrasi materi P4GN pada pelajaran yang relevan 	4.00	A	Sangat Mandiri

			<ul style="list-style-type: none"> - Pemutaran mars BNN dilingkungan sekolah - Sosialisasi pada kegiatan P5 - Sosialisasi menjadi pembina upacara 			
13	SMPN 14 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan poster P4GN dilingkungan sekolah - Pembentukan regulasi tata tertib siswa dengan sistem poin - Sosialisasi pada kegiatan MPLS - Integrasi materi P4GN pada pelajaran yang relevan - Pemutaran mars BNN dilingkungan sekolah - Pembentukan duta anti narkoba - Insert konten materi P4GN pada kegiatan sekolah - Melaksanakan Perjanjian Kerjasama terkait program P4GN - Sosialisasi dalam kegiatan ekstrakurikuler - Sosialisasi menjadi pembina upacara 	3,60	A	Sangat Mandiri
14	SMPN 15 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan poster P4GN dilingkungan sekolah - Pembentukan regulasi tata tertib siswa dengan sistem poin - Sosialisasi pada kegiatan MPLS - Integrasi materi P4GN pada pelajaran yang relevan - Pemutaran mars BNN dilingkungan sekolah - Sosialisasi pada kegiatan LDK OSIS 	3,20	B	Mandiri
15	SMPN 20 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan poster P4GN dilingkungan sekolah - Pembentukan regulasi tata tertib siswa dengan sistem poin - Sosialisasi pada kegiatan MPLS 	3,20	B	Mandiri

			<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi materi P4GN pada pelajaran yang relevan - Pemutaran mars BNN dilingkungan sekolah - Sosialisasi pada kegiatan LDK OSIS - Sosialisasi menjadi Pembina upacara 			
16	SMPN 24 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan poster P4GN dilingkungan sekolah - Pembentukan regulasi tata tertib siswa dengan sistem poin - Sosialisasi pada kegiatan MPLS - Integrasi materi P4GN pada pelajaran yang relevan - Pemutaran mars BNN dilingkungan sekolah - Sosialisasi menjadi Pembina upacara - Sosialisasi pada internal (guru dan staf) 	3,20	B	Mandiri
17	SMPN 25 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan poster P4GN dilingkungan sekolah - Pembentukan regulasi tata tertib siswa dengan sistem poin - Sosialisasi pada kegiatan MPLS - Integrasi materi P4GN pada pelajaran yang relevan - Pemutaran mars BNN dilingkungan sekolah - Insert konten materi P4GN pada kegiatan sekolah - Sosialisasi dalam kegiatan ekstrakurikuler - Sosialisasi menjadi pembina upacara 	3,20	B	Mandiri
18	SMPN 26 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan poster P4GN dilingkungan sekolah - Pembentukan regulasi tata tertib siswa dengan sistem poin - Sosialisasi pada kegiatan MPLS 	3,20	B	Mandiri

			<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi materi P4GN pada pelajaran yang relevan - Pemutaran mars BNN dilingkungan sekolah - Insert konten materi P4GN pada kegiatan sekolah - Sosialisasi dalam kegiatan ekstrakurikuler - Sosialisasi menjadi pembina upacara 			
19	SMA Pradita Dirgantara	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi P4GN pada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Sosialisasi P4GN seluruh siswa - Insert konten materi P4GN pada kegiatan ekstrakurikuler 	4.00	A	Sangat Mandiri
20	SMAN 8 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyisipkan materi P4GN pada materi pelajaran - Sosialisasi pada kegiatan MPLS - Memutarkan mars BNN - Sosialisasi pada kader OSIS, PMR dll - Pemasangan poster himbauan bahaya narkoba di sekolah 	4.00	A	Sangat Mandiri
21	SMKN 7 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi materi P4GN pada mata pelajaran yang relevan (PPKN, Bahasa Indonesia, Agama, PJOK, Seni dan Budaya) - Sosialisasi MPLS - Memutarkan mars BNN 	4.00	A	Sangat Mandiri
22	SMKN 8 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyisipkan materi P4GN pada pelajaran yang relevan - Sosialisasi pada kegiatan MPLS - Memutarkan mars BNN 	3,20	B	Mandiri
23	SMKN 9 Surakarta	Lingkungan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pada kegiatan MPLS - Pemuatan konten P4GN pada running teks 	2.80	B	Mandiri

			- Pembentukan regulasi pada tata tertib siswa			
--	--	--	---	--	--	--

Berdasarkan hasil Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) di atas, didapatkan rata-rata nilai IKP di Instansi Pemerintah sebesar 3,42 dalam kategori A (Sangat Mandiri) dan IKP di Lingkungan Pendidikan sebesar 3,52 dalam kategori A (Sangat Mandiri). Akumulasi rata-rata IKP BNN Kota Surakarta (Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan) sebesar 3,48 termasuk dalam kategori A (Sangat Mandiri).

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat anti narkoba terdapat kegiatan Tes Urine. Kegiatan Tes Urine dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan anggaran DIPA. Berikut pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tes Urine di Tahun 2024:

No	Tanggal	Sasaran	Lingkungan	Jumlah Peserta
1	5 April 2024	Awak Kereta Api	Instansi Pemerintah	20 Orang
2	6 Juni 2024	Penghuni Rumah Kost Kel Mojosongo	Masyarakat	19 Orang
3	12 Juni 2024	Penghuni rumah kost Kel Pajang	Masyarakat	18 Orang
4	29 Oktober 2024	Penghuni Rumah Kost Kel Mojo	Masyarakat	19 Orang
5	11 Desember 2024	Pengunjung Tempat Hiburan Malam Karaoke di Kab. Karanganyar	Masyarakat	47 orang
6	12 Desember 2024	Tempat Hiburan Malam Karaoke di Kab. Karanganyar	Masyarakat	53 orang

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Sebagai upaya untuk perbaikan kinerja ke depan, Tim P2M akan melaksanakan hal-hal berikut:

- a. Penggiat P4GN melaksanakan rencana aksi P4GN dengan memaksimalkan kegiatan melalui insert konten di instansi;
- b. Selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam sinergi P4GN;
- c. Pendampingan dalam pengisian data IKP bagi responden;
- d. Pendampingan dalam pengisian data KOTAN bagi responden.

4	Sasaran Strategis	Meningkatnya upaya pemulihannya penyalahguna dan/atau pecandu narkotika
---	--------------------------	--

TA 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Presentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	84,85	124,7

TA 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Presentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	70	83,33	119,05

Definisi Operasional

Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL).

Metode Pengukuran

Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan

kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrument WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu: Domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.

Keberhasilan/Kegagalan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah pencapaian persentase penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup. Indikator kinerja persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup baru ada di tahun 2023, sedangkan tahun 2021 dan 2022 belum ada indikator kinerja ini. Pada tahun 2023, Indikator kinerja persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup BNNP Jawa Tengah yaitu sebesar 83,33% (melebihi target) sedangkan pada tahun 2024 sebesar 87,12% (melebihi target).

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Peningkatan kualitas hidup diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrumen WHOQoL (WorldHealth Organization Quality of Life) - BREF yang mengukur 4 (empat) domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Pengukuran kualitas hidup dilakukan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan sehingga pengukuran dilakukan pada pada saat awal klien menerima layanan rehabilitasi dan pada akhir penerimaan layanan pascarehabilitasi.

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan BNNK Surakarta dalam mencapai target persentase penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah:

- a. Petugas rehabilitasi cukup berkompeten memberikan layanan yang profesional kepada klien sesuai kebutuhan;
- b. Petugas rehabilitasi melakukan pendampingan klien mulai dari awal sampai pada tahap bina lanjut;

c. Petugas rehabilitasi selalu membangun komunikasi efektif yang baik dengan klien selama proses rehabilitasi dan pascarehabilitasi.

Meskipun target indikator kinerja utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas adalah:

- a. Dalam domain lingkungan, sebagian besar klien sulit mengubah lingkungan sosial klien yang berisiko
- b. Di akhir bulan desember 2024, masih terdapat beberapa klien masih dalam proses rehabilitasi sehingga belum semua klien di tahun 2024 dapat dinilai kualitas hidupnya;
- c. Terkadang beberapa klien kurang mendapat dukungan dan perhatian keluarga dalam proses pemulihan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran kualitas hidup dilakukan pada saat awal klien menerima layanan rehabilitasi dan pada akhir penerimaan layanan pascarehabilitasi. Dalam mendapatkan peningkatan kualitas hidup klien yang optimal diperlukan layanan rehabilitasi yang efektif. Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan sumber daya manusia petugas rehabilitasi yang terbatas. Hal tersebut disiasati dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dengan pemantauan berkala melalui media whatsapp dan video call serta selalu berusaha melibatkan keluarga dan orang terdekat klien untuk terlibat dalam proses rehabilitasi.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk tahun 2025, upaya penyempurnaan kinerja dalam hal pencapaian persentase penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membuat penjadwalan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi klien secara teratur;
- b. Petugas rehabilitasi dapat memanfaatkan media komunikasi dalam memantau perkembangan klien;

- c. Petugas rehabilitasi selalu melibatkan keluarga dalam proses pemulihan klien;
- d. Seksi rehabilitasi rutin mengadakan konferensi kasus membahas perkembangan klien.

5	Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
----------	--------------------------	--

TA 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100

TA 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100

Definisi Operasional

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Metode Pengukuran

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Keberhasilan/Kegagalan

IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dengan cara menghadirkan layanan rehabilitasi di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Dalam menjalankan program IBM dibutuhkan agen pemulihan yang terlatih sehingga BNNK Surakarta memberikan bimbingan teknis.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah pencapaian petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih di BNN Kota Surakarta. Tahun 2023, BNNK Surakarta telah memberikan bimbingan teknis sebanyak 10 orang (sesuai target), yang berasal dari Kelurahan Setabelan dan Kelurahan Sudiroprajan, Tahun 2024, BNNK Surakarta telah berhasil memberikan bimbingan teknis kepada 10 orang (sesuai target) agen pemulihan dari Kelurahan Pajang dan Kelurahan Mojosongo.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Program IBM dilakukan dengan memberdayakan agen pemulihan (AP) yang merupakan kader IBM di desa/kelurahan. Agen pemulihan dipilih oleh Kepala Desa/Lurah untuk kemudian ditetapkan sebagai AP melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah mengenai pembentukan IBM dan penetapan AP, serta ditembuskan kepada Camat setempat. Kemudian, BNN Kota Surakarta memberikan pelatihan bagi masyarakat yang menjadi petugas AP.

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan BNNK Surakarta dalam mencapai target jumlah petugas penyelenggara layanan IBM terlatih adalah:

1. Antusias warga masyarakat untuk menjadi petugas Agen Pemulihan di desa/kelurahan masing-masing.
2. Adanya dukungan dari Kepala Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta instansi terkait untuk membentuk Agen Pemulihan di wilayahnya.

Meskipun target indikator kinerja utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas adalah:

1. Sulit menyamakan jadwal antara Petugas IBM dengan BNNK dalam pelaksanaan Bimtek IBM;
2. Agen Pemulihan terkadang masih ragu dalam memberikan penjangkauan dan layanan secara mandiri

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bimbingan teknis petugas Intervensi Berbasis Masyarakat dilaksanakan sebelum program IBM dimulai. Tahun 2024 seksi rehabilitasi memiliki dua unit IBM di Kelurahan Pajang dan Kelurahan Mojosongo dengan masing - masing unit IBM terdapat 5 orang agen pemulihan yang dilatih. Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan sumber daya manusia petugas rehabilitasi yang terbatas. Hal tersebut disiasati dengan menyelenggarakan bimbingan teknis untuk dua unit IBM dalam satu waktu bersamaan sehingga dapat mengefisiensi waktu dan tenaga fasilitator bimtek IBM.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk tahun 2025, upaya penyempurnaan kinerja dalam hal pencapaian jumlah petugas IBM yang terlatih, yang dapat dilakukan antara lain:

1. Petugas rehabilitasi berkoordinasi dengan perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat dalam menentukan tim agen pemulihan yang benar-benar berkomitmen dalam memberikan layanan IBM ke depannya
2. Petugas rehabilitasi mengatur dan membuat kesepakatan jadwal bimbingan teknis IBM dengan calon peserta bimbingan teknis petugas IBM jauh hari sebelum perencanaan kegiatan;
3. Petugas rehabilitasi membangun komitmen dengan calon Agen pemulihan/ petugas IBM agar dapat mengikuti bimbingan teknis IBM secara penuh sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

6	Sasaran Strategis	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
----------	--------------------------	--

TA 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	6	600

TA 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	8	800

TA 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3	8	266,67

TA 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3	9	300

Definisi Operasional

Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional yaitu jumlah lembaga yang telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional berdasarkan perjanjian kerjasama dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang penetapan lembaga rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika baik lembaga

rehabilitasi instansi pemerintah maupun lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan dan telah melaksanakan rehabilitasi kepada klien pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkotika.

Metode Pengukuran

Pengukuran indikator “Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional” dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memiliki PKS dengan BNN dan operasional memberikan layanan dalam satu tahun anggaran.

Keberhasilan/Kegagalan

Lembaga rehabilitasi merupakan fasilitas layanan kesehatan dan atau sosial yang memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna dan atau pecandu narkotika. Lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNN Kota Surakarta akan mendapatkan bimbingan teknis dan monitoring berkala untuk dapat beroperasi dan memberikan layanan rehabilitasi sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah pencapaian jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional di wilayah Surakarta dan zonasinya.. Tahun 2021, terdapat 9 lembaga rehabilitasi yang operasional dan bekerja sama dengan BNNK Surakarta yakni Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras, RSJD Surakarta, RSUD Dr. Moewardi, RSUD Fatmawati Soekarno Surakarta, Yayasan Anargya Sober House, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, Yayasan L-Paska, Yayasan Mitra Alam, Klinik Solo Medicare. Tahun 2022, BNNK Surakarta bekerja sama dengan 8 lembaga rehabilitasi yang operasional yakni Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras, RSJD Surakarta, RSUD Dr. Moewardi, RSUD Fatmawati Soekarno, Surakarta, Yayasan Anargya Sober House, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, Yayasan L-Paska, Klinik Solo Medicare. Tahun 2023, BNNK Surakarta bekerja sama dengan 6 lembaga rehabilitasi yang operasional yakni Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras, RSJD Surakarta,

RSUD Dr. Moewardi, RSUD Fatmawati Soekarno Surakarta, Yayasan Anargya Sober House, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, Yayasan L-Paska. Tahun 2023, BNNK Surakarta bekerja sama dengan 6 lembaga rehabilitasi yang operasional yakni Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras, RSJD Surakarta, RSUD Dr. Moewardi, RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo, Yayasan Anargya Sober House, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa.

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Lembaga rehabilitasi hadir di tengah masyarakat memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang memberikan layanan yang sesuai standar pelayanan. BNNK Surakarta sebagai leadership di bidang P4GN berupaya untuk melakukan bimbingan teknis dan monitoring layanan rehabilitasi agar sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi.

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan BNNK Surakarta dalam mencapai target jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional adalah:

1. Adanya kemauan dan kemampuan dari SDM untuk memenuhi standar pelayanan minimal;
2. Adanya kerjasama dalam tim lembaga rehabilitasi yang solid;
3. Adanya sarana prasarana yang mendukung.

Meskipun target indikator kinerja utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas adalah:

1. Layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat belum berjalan optimal karena terkendala kurangnya SDM yang terlatih
2. Tidak ada bangsal rawat inap khusus napza di RSUD Dr Moewardi dan RSAU Dr Siswanto;
3. Kendala birokrasi dalam pengajuan kerja sama dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah;
4. Beberapa lembaga rehabilitasi kesulitan dalam memenuhi standar lembaga rehabilitasi sesuai dengan SNI 8807: 2022 baik karena pemenuhan anggaran maupun birokrasi pemerintah dalam pengajuan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Lembaga Rehabilitasi yang operasional di wilayah kerja BNNK Surakarta di Tahun 2024 terdapat 6 lembaga rehabilitasi. Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan sarana - prasarana dan sumber daya manusia di fasilitas rehabilitasi secara optimal. Hal tersebut disiasati dengan beberapa hal:

1. RSAU Dr. Siswanto menggunakan poli jiwa untuk melayani pasien napza;
2. RSAU Dr Siswanto menggunakan bangsal kelas I yang berkapasitas 1 pasien dan hanya menjalankan program detoksifikasi;
3. Layanan di RS Pemerintah belum memiliki konselor khusus adiksi dan memberdayakan perawat, psikolog. Dokter yang sudah dilatih untuk merangkap tugas sebagai konselor adiksi

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk tahun 2025, upaya penyempurnaan kinerja dalam hal pencapaian jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional, yang dapat dilakukan antara lain:

1. Petugas rehabilitasi berkoordinasi dengan beberapa fasyankes atau lembaga swasta yang berpotensi untuk memberikan layanan rehabilitasi
2. Petugas rehabilitasi akan mengunjungi lembaga rehabilitasi yang telah bekerja sama dengan BNNK Surakarta di Tahun 2024 untuk memverifikasi ulang dan mengajukan kerja sama di tahun 2025;
3. BNNK Surakarta akan mengajukan permohonan peningkatan kemampuan SDM bagi lembaga rehabilitasi mitra;
4. Untuk Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta akan dilaksanakan perpanjangan ijin operasional di tahun 2025.

7	Sasaran Strategis	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
---	--------------------------	--

TA 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	100

TA 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	100

TA 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1	1	100

TA 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1	1	100

Definisi Operasional

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya.

Metode Pengukuran

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Keberhasilan/Kegagalan

IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dengan cara menghadirkan layanan rehabilitasi di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah pencapaian jumlah unit layanan intervensi berbasis masyarakat yang operasional di BNN Kota Surakarta. Tahun 2021, BNNK Surakarta telah membentuk 1 unit IBM (sesuai target) yakni IBM Kelurahan Baluwarti. Tahun 2022 BNNK Surakarta telah membentuk 1 unit IBM (sesuai target) yakni IBM Kelurahan Joyotakan. Tahun 2023, BNNK Surakarta telah membentuk dua unit IBM (sesuai target) yakni IBM Kelurahan Setabelan dan IBM Kelurahan Sudiroprajan, Tahun 2024, BNNK Surakarta telah membentuk dua unit IBM (sesuai target) yakni IBM Kelurahan Pajang dan Kelurahan Mojosongo. Unit IBM Kelurahan Pajang dan Kelurahan Mojosongo masuk dalam kategori “Tangguh”

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat diawali dari penunjukan lokasi IBM yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala BNNK Surakarta. Kelurahan yang ditunjuk sebagai lokasi IBM akan menetapkan agen pemulihan yang akan menjalankan program IBM melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah mengenai pembentukan IBM dan penetapan AP, serta ditembuskan kepada Camat setempat. Program yang dijalankan meliputi Sosialisasi, Pemetaan, Penjangkauan Klien IBM, Penerimaan Awal Klien IBM, Layanan Intervensi, dan layanan bina lanjut.

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan BNNK Surakarta dalam mencapai target unit layanan IBM yang operasional adalah:

1. Melakukan asistensi secara berkala untuk mengetahui perkembangan layanan IBM;
2. Mengadakan rapat tim rutin 1 kali per bulan untuk membahas rencana kegiatan IBM serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan;
3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait yakni BPVP Surakarta dan mendapatkan pelatihan keterampilan Service Kendaraan Bermotor Roda Dua;
4. Adanya komitmen perangkat desa dan Agen Pemulihan (AP) untuk menyelenggarakan layanan IBM.

Meskipun target indikator kinerja utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan -hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas adalah:

1. Kesibukan masing-masing Agen Pemulihan dan klien karena memiliki pekerjaan/aktivitas masing-masing;
2. Padatnya beberapa kegiatan kelurahan yang bersamaan dengan aktivitas layanan IBM seperti pada bulan Agustus;
3. Tidak adanya dukungan anggaran dari kelurahan/ swasta untuk pelaksanaan program IBM sehingga penyelenggaraan unit IBM hanya sampai kategori tangguh.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Unit Layanan IBM yang operasional harus mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi, pemetaan, penjangkauan, layanan intervensi dan layanan bina lanjut. Tahun 2024 seksi rehabilitasi memiliki dua unit IBM di Kelurahan Pajang dan Kelurahan Mojosongo dengan masing - masing unit IBM terdapat 5 orang agen pemulihan yang dilatih. Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan sumber daya agen pemulihan yang terbatas dengan jadwal waktu yang padat. Hal tersebut disiasati oleh agen pemulihan dengan perencanaan jadwal kegiatan IBM dengan baik seperti kegiatan sosialisasi IBM diselipkan dalam kegiatan warga. Selain itu juga pembagian tugas dalam pelaksanaan layanan IBM oleh agen pemulihan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk tahun 2025, upaya penyempurnaan kinerja dalam hal pencapaian jumlah unit IBM yang operasional, yang dapat dilakukan antara lain:

1. Petugas rehabilitasi membantu mengarahkan agen pemulihan dalam menyusun jadwal perencanaan jadwal kegiatan IBM dan mengatasi kendala program IBM;
2. Petugas rehabilitasi mendampingi agen pemulihan dalam melakukan penjangkauan dan memberikan layanan apabila diperlukan;
3. Petugas rehabilitasi mampu mendorong kelurahan IBM agar dapat mengajukan anggaran untuk operasional IBM ke depannya.

8	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika
----------	--------------------------	---

TA 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,42	3,53	103.22

TA 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,4	3,67	107.94

TA 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,2	3,55	107.94

TA 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,2	3,383	105.72

Definisi Operasional

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode Pengukuran

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan setiap tahun terhadap perkembangan kondisi aktual terkait 5 (lima) aspek, yaitu; (1) peningkatan fasilitas rehabilitasi baru, (2) peningkatan fasilitas rehabilitasi memenuhi standar, (3) peningkatan petugas tersertifikasi, (4) peningkatan kepuasan penerima layanan, (5) peningkatan penyalah guna, korban

penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi berkelanjutan.

Keberhasilan/Kegagalan

BNN Kota Surakarta memberikan layanan rehabilitasi di Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras. Kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan tentunya salah satunya diukur dengan Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah pencapaian indeks kepuasan penerima layanan pada fasilitas rehabilitasi di BNN Kota Surakarta. Tahun 2021, BNNK Surakarta mencapai indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi sebesar 3,383 (melebihi target). Tahun 2022 BNNK Surakarta mencapai indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi sebesar 3,55 (melebihi target). Tahun 2023, BNNK Surakarta mencapai indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi sebesar 3,67 (melebihi target), Tahun 2024, BNNK Surakarta mencapai indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi sebesar 3,53 (melebihi target).

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

Penilaian indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi (IKM) penting sebagai penilaian kualitas layanan dan bahan evaluasi layanan rehabilitasi ke depannya. Tahun 2024, Klinik Pratama Rehabilitasi mencapai nilai IKM sebesar 3,53 sudah memenuhi target tetapi sedikit menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai nilai 3,67.

Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan BNNK Surakarta dalam mencapai target nilai indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi adalah:

1. SDM klinik pratama rehabilitasi BNNK Surakarta cukup lengkap dan sudah mendapatkan pelatihan dasar adiksi;
2. Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta sudah mendapatkan rekomendasi SNI Tipe III pada tahun 2022 dan tetap mempertahankan layanan sesuai standar;

3. Tahun 2024, Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras telah mendapatkan penilaian akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan;
4. Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras memberikan layanan sesuai SOP dan panduan yang telah ditetapkan.

Meskipun target indikator kinerja utama tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan -hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas adalah:

1. Survey dilakukan secara online, sehingga ada kendala berupa koneksi internet dan beberapa klien kurang memahami bagaimana mengisi kuesioner secara online;
2. Beberapa pertanyaan kuesioner IKM agak kurang dapat dipahami

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Unit Layanan IBM yang operasional harus mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi, pemetaan, penjangkauan, layanan intervensi dan layanan bina lanjut. Tahun 2024 seksi rehabilitasi memiliki dua unit IBM di Kelurahan Pajang dan Kelurahan Mojosongo dengan masing - masing unit IBM terdapat 5 orang agen pemulihan yang dilatih. Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya sarana prasarana alat telekomunikasi dan jaringan internet.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk tahun 2025, indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi di BNNK Surakarta, yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperbaiki sarana prasarana Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras untuk meningkatkan kenyamanan penerima layanan;
2. Petugas rehabilitasi berkomitmen untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan kondisi klien;
3. Tahun 2025, Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras akan memperbarui ijin klinik dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Selain indikator kerja yang tersebut diatas BNNK Surakarta memiliki program rehabilitasi yang tertuang dalam DIPA BNNK Surakarta. Kegiatan yang termasuk dalam DIPA BNNK Surakarta berupa rawat jalan, Skrining Intervensi Lapangan (SIL) dan SKHPN. Berikut capaian pelaksanaan program tersebut

Tabel

Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik BNNK Surakarta

No	Wilayah	Target (orang)	Capaian (orang)	Selesai Program (orang)	Rujuk (orang)	DO (orang)	Proses Rehabilitasi (orang)
1	BNNK Surakarta	20	29	22	2	0	5

Tabel

Layanan SKHPN di Klinik BNNK Surakarta

No	Instansi	SKHPN	
		Target	Realisasi
1	BNNK Surakarta	207	225

Tabel

Kegiatan SIL

No	Wilayah	Klien Yang Mengakses Layanan SIL	Klien SIL yang Mengikuti Program Rehab di Klinik	
			Target	Capaian
1.	BNNK Surakarta	18	10	11

Tabel

Capaian Realisasi Anggaran 2024

3259 (Pascarehab)			3260 (PLRKM)			3256 (000)			TOTAL		
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
15.463	15.463	100	129.103	129.101.5	99,99	5.315	5.315.	100	149.881	149.789.5	99,99

*dalam ribuan

*anggaran terblokir tidak dimasukkan

9	Sasaran Strategis	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien
----------	--------------------------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kinerja anggaran BNN	87	99,09	113,89%

Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kinerja anggaran BNN	92	86,36	93,86%

Tahun Anggaran 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kinerja anggaran BNN	87	93,46	107,42%

Tahun Anggaran 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kinerja anggaran BNN	92	86,36	93,86%

Definisi operasional

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja BNN Kota Surakarta ke dalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

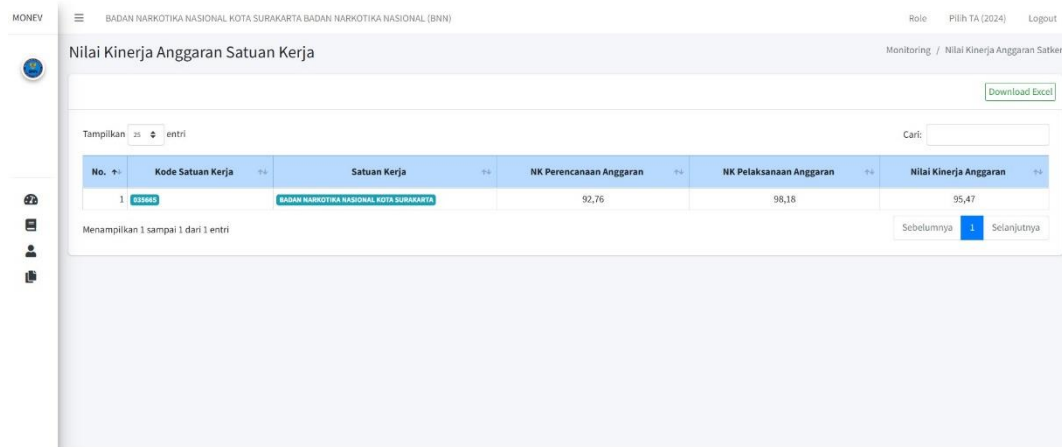
Metode Pengukuran

Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L. Nilai Kinerja Anggaran

diperoleh dari penilaian yang terdiri dari komponen capaian output, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran dan penyerapan anggaran.

Keberhasilan/Kegagalan

Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surakarta pada tahun anggaran 2024 sebesar 99,09 (Kategori Sangat Baik) dengan hasil pengukuran terlampir.



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	031000	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA	92,76	98,18	95,47

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

BNN Kota Surakarta pada tahun ini berhasil memenuhi target Nilai Kinerja Anggaran (NKA), dari target 87 diperoleh NKA sebesar 99,09. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dikarenakan Penyerapan anggaran yang tinggi sesuai target yang telah ditentukan sebesar (99,6%). BNNK Surakarta melaporkan capaian output dimana realisasi melebihi target yakni pada Layanan SKHPN dari target 207 terealisasi sebesar 220. Realisasi yang melebihi target meningkatkan nilai komponen Efisiensi yang berpengaruh pada Nilai kinerja anggaran.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai Nilai Kinerja Anggaran sesuai yang ditargetkan, BNN Kota Surakarta memperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 92,76 yang perhitungannya terdiri dari komponen Efektivitas Capaian RO dan Efisiensi Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK). Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan anggaran yang ada, BNNK Surakarta telah berhasil bahkan melebihi target yang ditentukan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Rekomendasi atau rencana aksi ke depan untuk dapat meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran adalah semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10	Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-----------	--------------------------	--

Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surakarta	96,21	98,18	102,04%

Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surakarta	92	96,11	104,46%

Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surakarta	95	97,76	102,90%

Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Surakarta	94	98,55	104,8%

Definisi Operasional

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja

Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode Pengukuran

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA meliputi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Adapun elemen pengelolaan kinerja dan anggaran satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satuan Kerja dalam satu triwulan
2. Deviasi Halaman III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan pada setiap jenis belanja.
3. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap Triwulan.
4. Belanja Kontraktual, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen rata-rata nilai kinerja aras ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN; rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/ kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan.

5. Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) dihitung berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP tunai.
7. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM melebihi batas waktu.
8. Capaian Output dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output dan nilai kinerja atas capaian RO.

Keberhasilan/Kegagalan

Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surakarta pada tahun anggaran 2024 sebesar 98,14 (Kategori Sangat Baik) dengan hasil pengukuran terlampir.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	028	066	035665	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA	Nilai	100.00	88.13	100.00	100.00	100.00	99.59	100.00	98.18	100%	0.00	98.18
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.22	20.00	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	94.07			99.90		100.00					

Kualitas Keberhasilan/Kegagalan

BNN Kota Surakarta pada tahun ini berhasil memenuhi target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dari target 96,21 diperoleh Nilai IKPA sebesar 98,18. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dikarenakan Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran (94,07),

Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran (99,90), dan Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (100)

BNN Kota Surakarta berhasil memperoleh nilai IKPA dengan kategori Sangat Baik dikarenakan beberapa faktor yaitu

1. Ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan;
2. Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
3. Pengelolaan uang persediaan, kontrak, SPM, dan laporan pertanggungjawaban.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pengelolaan keuangan, BNNK Surakarta berhasil memaksimalkan Anggaran yang diperoleh dari anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 99.62% dan capaian output dapat seluruhnya tercapai sesuai target.

Di bidang pengelolaan keuangan, BNN Kota Surakarta sudah memiliki SDM Fungsional Keuangan yakni Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat memaksimalkan kualitas pelaksanaan anggaran BNNK Surakarta secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

BNNK Surakarta pada tahun ini mendapatkan nilai IKPA melebihi target dengan kategori sangat baik, namun diharapkan pada tahun 2025 nanti BNNK Surakarta dapat meningkatkan nilai IKPA dengan memperbaiki dan meningkatkan poin terutama pada komponen Deviasi Halaman III DIPA (Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan) dan selalu memaksimalkan Capaian Output agar dapat terlaksana seluruhnya.

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2024 BNN Kota Surakarta mendapat alokasi anggaran awal sebesar **Rp.1.781.312.000,-** terdiri dari Pagu Awal Rupiah Murni sebesar **Rp. 1.746.512.000,-** dan PNPB sebesar **Rp. 34.800.000,-**. Seiring dengan adanya aturan revisi anggaran terkait Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya, maka Pagu akhir BNNK Surakarta menjadi sebesar **Rp. 1.663.996.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 1.657.643.548-** persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar **99,62%**.

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER			
1	035665 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA	PAGU	0	1.663.996.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663.996.000
		REALISASI	0	1.657.643.548 (99,62%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.657.643.548 (99,62%)
		SISA	0	6.352.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.352.452
GRAND TOTAL		PAGU	0	1.663.996.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663.996.000
		REALISASI	0	1.657.643.548 (99,62%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.657.643.548 (99,62%)
		SISA	0	6.352.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.352.452

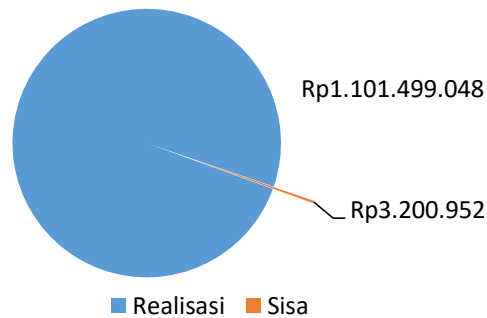
Anggaran BNN Kota Surakarta Tahun 2024 dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dengan pagu sebesar Rp. 1.104.700.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 1.104.700.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.101.499.048- (99,71%), sisa anggaran sebesar Rp. 3.200.952,- (0,29%).

Sisa anggaran tersebut di atas adalah sisa dari anggaran layanan perencanaan dan layanan umum yang berasal dari anggaran perjalanan dinas yang diblokir.

Grafik Realiasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya

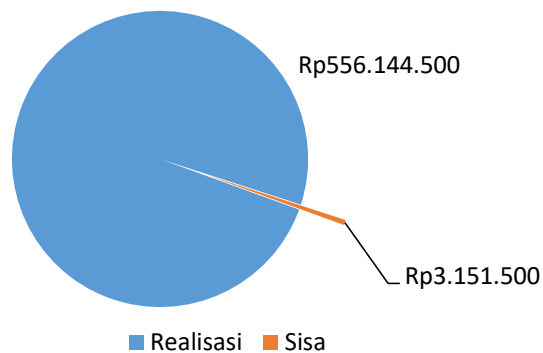


2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan pagu sebesar Rp. 559.296.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 559.296.000- telah terealisasi sebesar Rp. 556.144.500,- (99,43%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.151.500,- (0,57%).

Sisa anggaran tersebut di atas merupakan anggaran perjalanan dinas yang diblokir sehingga tidak dapat terserap.

Grafik Realisasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kota Surakarta Tahun 2024, merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kota Surakarta sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Surakarta telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2024-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja pilar-pilar BNN Kota Surakarta yaitu Tim Kerja Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Kerja Rehabilitasi, Tim Kerja Pemberantasan dan Sub Bagian Umum serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN Kota Surakarta dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNN Kota Surakarta pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Dari 9 sasaran dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kota Surakarta, pada umumnya BNNK Surakarta telah melakukan kinerja secara maksimal.

Laporan kinerja ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN Kota Surakarta tahun 2024, telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2024-2024.